

PENYELESAIAN KONFLIK LINGKUNGAN, EKONOMI, DAN SOSIAL DALAM PEMANFAATAN POTENSI MARITIM DI KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN LABUHAN HAJI, LOMBOK

Resolution of Environmental, Economic, and Social Conflicts in the Utilization of Maritime Potential in Labuhan Haji Fishing Port Area, Lombok

Oleh:

Mustaruddin^{1*}, Ateng Supriatna², Gondo Puspito¹, Naufal Aqiel Fitrachman²,
Muhammad Zaky Arkan¹, Zulkarnain¹, Fis Purwangka¹

¹Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, FPIK
IPB University, Indonesia

²Program Studi Logistik Agro-Maritim, Sekolah Pascasarjana
IPB University, Indonesia

*Korespondensi penulis: mustaruddin@apps.ipb.ac.id

ABSTRAK

Studi ini bertujuan menganalisis keragaan konflik lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam pemanfaatan potensi maritim, dan mengimplementasikan model ICOFISH-MT (*integration of coastal fisheries management and marine tourism*) dalam penyelesaian konflik tersebut. Metode terdiri dari metode deskriptif dan pendekatan model ICOFISH-MT. Konflik pemanfaatan potensi maritim di Kawasan Pelabuhan Perikanan Labuhan Haji ada 8 (delapan), terbagi atas 4 konflik lingkungan, 3 konflik ekonomi, dan 1 konflik sosial. Statusnya 2 konflik berstatus ada penyelesaian skala terbatas dan 6 konflik belum ada penyelesaian. Implementasi model ICOFISH-MT dalam penyelesaian konflik menunjukkan teknik resolusi konflik terpilih dominan adalah negosiasi dan mediasi (75 %). Lembaga pengelola konflik yang terbentuk mempunyai kepengurusan lima orang yang terdiri dari : ketua (1 orang), wakil ketua (1 orang), sekretaris (1 orang), dan seksi kegiatan (2 orang). Skema kerja sama untuk memanfaatkan peluang integrasi/sinergi kegiatan dari para pihak yang berkonflik terdiri atas 4 kerja sama profit, 3 kerja sama non-profit, dan 1 kerja sama profit dan non-profit. Hasil penyelesaian konflik dengan model ICOFISH-MT diyakini dapat menjamin keberlanjutan pemanfaatan potensi maritim, meningkatkan lapangan kerja nelayan, pelaku wisata dan masyarakat, serta menguatkan peran pelabuhan perikanan.

Kata kunci: lingkungan, maritim, pelabuhan perikanan, perikanan, resolusi konflik

ABSTRACT

This study aimed to analyze the performance of environmental, economic, and social conflicts in the utilization of maritime potential, and implement the ICOFISH-MT (integration of coastal fisheries management and marine tourism) model in resolving these conflicts. The method consisted of a descriptive method and the ICOFISH-MT model approach. There were 8 (eight) conflicts in the utilization of maritime potential in the Labuhan Haji Fishing Port Area, divided into 4 environmental conflicts, 3 economic conflicts, and 1 social conflict. The status of 2 conflicts had a limited scale resolution status and 6 conflicts have not been resolved. The implementation of the ICOFISH-MT model in conflict resolution showed that the dominant conflict resolution techniques were negotiation and mediation (75%). The conflict management institution formed had a five-person management consisting of : chairman (1 person), vice chairman (1 person), secretary (1 person), and activities section (2 people). The cooperation scheme to utilize opportunities for integration/synergies

of activities from the conflicting parties consisted of 4 profit-based cooperation, 3 non-profit cooperation, and 1 profit and non-profit cooperation. The results of conflict resolution using the ICOFISH-MT model are believed to be able to guarantee the sustainability of maritime potential utilization, increase employment opportunities for fishermen, tourism workers, and the community, and strengthen the role of fishing ports.

Key words: *conflict resolution, environment, fishing port, fisheries, maritime*

PENDAHULUAN

Kabupaten Lombok Timur merupakan kabupaten dengan kontribusi kemaritiman paling besar di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kegiatan kemaritiman yang utama adalah kegiatan perikanan laut. Produksi ikan laut di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2024 mencapai 25.114 ton. Produksi tersebut merupakan penyumbang terbesar produksi perikanan laut NTB, diantara 10 kabupaten/kota yang ada. Kegiatan perikanan laut tersebut melibatkan 33.836 nelayan atau 34,06% dari total nelayan yang ada di NTB (KKP, 2024).

Selain perikanan laut, kegiatan kemaritiman yang juga dominan adalah wisata bahari. Wisata bahari merupakan kegiatan wisata utama di Provinsi NTB dan pengembangannya telah menjangkau banyak wilayah, termasuk wilayah perairan pantai Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan wisata bahari ini berkembang pesat di Kabupaten Lombok Timur karena perairannya yang relatif tenang, banyak *spot* pemancingan dan *snorkeling*, serta pasir pantainya yang indah (Qolby & Hailuddin, 2022; Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, 2023). Namun demikian, perkembangan kegiatan wisata bahari tersebut cenderung mengganggu beberapa kegiatan perikanan laut yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Hal ini terjadi di perairan sekitar Pelabuhan Perikanan (PP) Labuhan Haji dan beberapa sentra perikanan lainnya di Selat Alas. Gangguan tersebut terjadi dalam bentuk rusaknya jaring penangkapan ikan akibat tertabrak kapal wisata, rusaknya ekosistem terumbu karang dan menurunnya hasil tangkapan ikan, dan sampah wisata yang menyebar di sekitar pelabuhan perikanan dan perairan pantai (Ayunda *et al.*, 2014; Byrnes *et al.*, 2016; Firdaus *et al.*, 2020; Mustaruddin *et al.*, 2022). Kondisi ini merupakan bentuk destruksi pemanfaatan potensi maritim, baik secara lingkungan, ekonomi, maupun sosial yang selama ini sering menjadi sumber konflik di Kabupaten Lombok Timur.

Sebagaimana halnya sektor perikanan, sektor pariwisata dengan kegiatan berupa wisata bahari merupakan sektor unggulan di Kabupaten Lombok Timur dan Provinsi NTB. Akibatnya, pembatasan kegiatan pada salah satu sektor tersebut tidak bisa dilakukan (DKP Kabupaten Lombok Timur, 2024). Terkait hal ini, upaya yang paling tepat dilakukan adalah menyelesaikan konflik pemanfaatan kedua potensi maritim tersebut, sambil mencari celah kolaborasi dan integrasinya. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan model ICOFISH-MT (*integration of coastal fisheries management and marine tourism*). Model ICOFISH-MT yang dikembangkan melalui Program Riset Fundamental, BIMA tahun 2024 difokuskan untuk mencari titik temu pemanfaatan potensi maritim yang dilakukan oleh para pihak di bidang kemaritimaan (Mustaruddin *et al.*, 2024). Dengan demikian, ada kecocokan yang tinggi untuk menyelesaikan permasalahan pemanfaatan potensi maritim, baik disisi lingkungan, ekonomi, maupun sosial di Kawasan PP Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur.

Studi ini bertujuan menganalisis keragaan konflik lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam pemanfaatan potensi maritim, dan mengimplementasikan model ICOFISH-MT dalam penyelesaian konflik pemanfaatan potensi maritim di Kawasan PP Labuhan Haji, Lombok.

METODE PENELITIAN

Studi ini dilaksanakan pada bulan Juli 2025. Lokasi studi adalah Kawasan PP Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Data yang dikumpulkan terdiri dari data

jenis konflik, data pihak yang berkonflik, data status konflik, data terapan model ICOFISH-MT, serta pendapat dan harapan para pihak dalam penyelesaian konflik. Metode pengumpulan data adalah pelatihan, *focus group discussion* (FGD), wawancara, dan pengamatan lapang. Pelatihan dan FGD dilakukan untuk mengumpulkan data jenis konflik, data pihak yang berkonflik, dan data terapan model dalam resolusi konflik. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dalam bentuk pendapat dan harapan para pihak dalam penyelesaian konflik. Pengamatan lapang dilakukan untuk mengumpulkan data status konflik dan melengkapi data jenis konflik.

Metode analisis data terdiri dari metode deskriptif dan pendekatan model ICOFISH-MT. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan keragaan konflik pemanfaatan potensi maritim. Keragaan konflik tersebut dibagi dalam tiga isu utama, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial. Gambaran keragaan konflik dan informasi para pihak yang berkonflik, selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel atau gambar yang relevan (Mustaruddin *et al.*, 2022; Nordal *et al.*, 2025).

Pendekatan model ICOFISH-MT (Mustaruddin *et al.*, 2024; Msomphor, 2016) diarahkan untuk menganalisis pola penyelesaian konflik pemanfaatan potensi maritim, baik konflik lingkungan, ekonomi, maupun sosial. Pola penyelesaian konflik tersebut dibagi dalam beberapa tahapan (Mustaruddin *et al.*, 2024), yaitu: (a) penentuan teknik resolusi konflik, (b) analisis peluang integrasi/sinergi kegiatan pemanfaatan potensi maritim (perikanan, wisata bahari, jasa kelautan, dan lainnya), (c) pembentukan lembaga pengelola konflik, (d) pengembangan skema kerja sama serta bentuk peran dalam penyelesaian konflik dan integrasi pemanfaatan potensi maritim. Terkait teknik resolusi konflik, opsi resolusi yang ditawarkan adalah konsiliasi, mediasi, negosiasi, arbitrase, dan litigasi (Lewin *et al.*, 2025; Msomphora, 2016). Pembentukan lembaga pengelola konflik dilakukan mensintesis status konflik dan teknik resolusi konflik yang terpilih dominan. Skema kerja sama dikelompokkan dalam bentuk profit dan non-profit (Das *et al.*, 2025), sehingga dapat diestimasi tingkat kepentingan dan bentuk peran yang bisa diberikan para pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keragaan Konflik Lingkungan, Ekonomi, dan Sosial dalam Pemanfaatan Potensi Maritim

Konflik pemanfaatan potensi maritim di Kawasan PP Labuhan Haji, terbagi atas tiga kelompok, yaitu konflik lingkungan, konflik ekonomi, dan konflik sosial. Pengelompokan konflik didasarkan pada isu utama yang menjadi penyebab konflik. Konflik tersebut terjadi, umumnya dilandasi suatu isu utama yang kemudian berkembang dan melibatkan beberapa pihak yang kepentingannya terganggu atau terkena isu konflik (Lewin *et al.*, 2025). Tabel 1 menyajikan keragaan konflik lingkungan, ekonomi, dan sosial tersebut dalam pemanfaatan potensi maritim di Kawasan PP Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur.

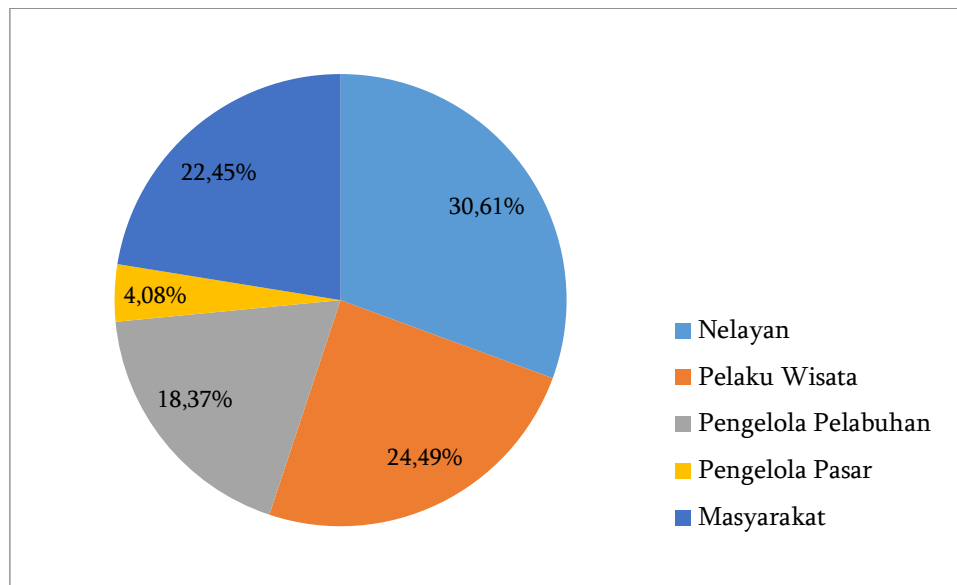
Berdasarkan Tabel 1, konflik yang terkait lingkungan lebih banyak daripada konflik terkait ekonomi dan sosial. Konflik yang dominan terkait lingkungan, diantaranya perselisihan tentang sampah di perairan pantai, keasaman perairan tinggi di lokasi yang berdekatan dengan tempat wisata dan pasar, kerusakan terumbu karang/habitat ikan di perairan dangkal, dan perselisihan terkait abrasi di tempat pendaratan ikan tradisional. Konflik tersebut sebagian besar berawal dari komplain nelayan kepada pelaku wisata yang melaksanakan aktivitas wisata di perairan pantai sekitar PP Labuhan Haji. Hal ini bisa dipahami karena wisata yang berkembang di Pulau Lombok adalah wisata bahari yang lokasi aktivitasnya berimpitan dengan nelayan (Mustaruddin *et al.* 2022; Qolby & Hailuddin, 2022). Konflik lingkungan tersebut ada juga yang berasal dari komplain nelayan kepada pengelola pelabuhan dan masyarakat, misalnya terkait abrasi di tempat pendaratan ikan tradisional.

Tabel 1. Keragaan konflik lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam pemanfaatan potensi maritim

| Jenis Konflik | Kelompok Konflik | Pihak Yang Berkonflik | Dugaan Penyebab | Status Konflik |
|---|------------------|---|---|--|
| Perselisihan tentang sampah di perairan pantai | Lingkungan | Nelayan, pelaku wisata, masyarakat | Banyak sampah wisata, ketiadaan tempat pembuangan sampah masyarakat | Belum ada penyelesaian |
| Penguasaan wilayah perairan untuk <i>spot</i> wisata di areal <i>fishing ground</i> | Ekonomi, | Nelayan, pelaku wisata, pengelola pelabuhan | Pengaturan pemanfaatan wilayah laut dan jalur pelayaran belum tersedia | Belum ada penyelesaian |
| Keasaman perairan tinggi di lokasi yang berdekatan dengan tempat wisata dan pasar | Lingkungan | Nelayan, pelaku wisata, pengelola pasar | Limbah dari hotel, pasar, dan pemukiman banyak dibuang ke perairan | Ada penyelesaian terbatas, sering muncul kembali |
| Alat tangkap sering hilang/rusak di jalur pelayaran wisata | Ekonomi | Nelayan, pelaku wisata, pengelola pelabuhan | Intensitas wisata pelayaran yang meningkat, belum ada pengaturan jalur untuk pelayaran dan penangkapan ikan | Belum ada penyelesaian |
| Kerusakan terumbu karang/habitat ikan di perairan dangkal | Lingkungan | Nelayan, pelaku wisata | Aktivitas <i>diving</i> dan <i>snorkeling</i> , penangkapan dengan alat tangkap destruktif | Ada penyelesaian dengan konservasi terumbu karang, tetapi belum menyeluruh |
| Hasil tangkapan ikan menurun di perairan pantai | Ekonomi | Nelayan, pelaku wisata, pengelola pelabuhan | Rekreasi pantai yang meningkat, kesuburan perairan terganggu | Belum ada penyelesaian |
| Kecemburuan terhadap sistem rekrutmen tenaga kerja wisata | Sosial | Nelayan, pelaku wisata, masyarakat | Tenaga kerja wisata banyak direkrut dari luar daerah, masyarakat kurang terampil | Belum ada penyelesaian |
| Perselisihan terkait abrasi di tempat pendaratan ikan tradisional | Lingkungan | Nelayan, pelaku wisata, pengelola pelabuhan | Pemasangan turap di areal pelabuhan dan tempat wisata yang mengikis sisi lain dari pantai | Belum ada penyelesaian |

Konflik ekonomi dan sosial, dominan terkait pola penguasaan wilayah perairan untuk *spot* wisata di areal *fishing ground* dan hasil tangkapan ikan menurun di perairan pantai. Konflik ini dianggap sebagai dampak dari pembiaran masalah lingkungan di perairan dan belum adanya pengaturan pemanfaatan wilayah laut terutama di kawasan yang padat aktivitasnya. Dari sisi status

konflik, sebagai besar konflik tersebut belum ada penyelesaian. Hal ini tentu kurang baik karena konflik bisa membesar, bahkan menghasilkan konflik baru yang susah ditangani (Msomphora, 2016; Trathan *et al.* 2025).



Gambar 1. Keterlibatan para pihak dengan konflik pemanfaatan potensi maritim

Pihak yang berkonflik dalam pemanfaatan potensi maritim, sebagian besar didominasi oleh nelayan dan pelaku wisata (Gambar 1). Pengelola pelabuhan terlibat konflik dominan karena ada keterkaitan antara peran dan fungsi pelabuhan perikanan. Pada konflik hasil tangkapan ikan menurun di perairan pantai, pengelola pelabuhan dianggap terlibat karena mengeluarkan surat laik operasi (SLO) kapal ikan dan hasil tangkapan ikan yang didapat juga didaratkan di pelabuhan perikanan. Pada konflik penguasaan wilayah perairan untuk *spot* wisata di areal *fishing ground*, pengelola pelabuhan terlibat karena perannya dalam pengaturan jalur pelayaran (Gomez *et al.*, 2021). Begitu juga terkait perselisihan abrasi, pengelola pelabuhan terkait karena ada turap yang dibangun oleh pelabuhan yang kemudian merubah arah arus laut dan menimbulkan abrasi. Namun demikian, keterlibatan nelayan dan pelaku wisata tetap menjadi yang paling dominan dalam konflik, karena keduanya menjadi pelaku utama dalam pemanfaatan potensi maritim di Kabupaten Lombok Timur dan Propinsi NTB.

Resolusi Konflik Menggunakan Model ICOFISH-MT

Resolusi konflik merupakan tahapan penting dalam implementasi model ICOFISH-MT untuk penyelesaian konflik pemanfaatan potensi maritim, baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Dalam meresolusi konflik, model ICOFISH-MT mengarahkan perlunya komitmen nyata dari pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan konflik dan sebisa mungkin mendapat peluang sinergi/integrasi. Peluang integrasi tersebut dapat terjadi pada kegiatan perikanan, wisata bahari, jasa kelautan, dan lainnya. Tabel 2 menyajikan formula resolusi terhadap konflik lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam pemanfaatan potensi maritim di Kawasan PP Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya Gambar 2 menyajikan aktivitas pelatihan dan FGD resolusi konflik dengan model ICOFISH-MT.

Berdasarkan Tabel 2, sebagian besar konflik pemanfaatan potensi maritim di Kawasan PP Labuhan Haji dapat diresolusi dengan teknik negosiasi dan mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa pihak-pihak yang berkonflik mempunyai itikad yang baik dan keterbukaan yang tinggi untuk menyelesaikan konflik, walaupun dengan bertemu secara langsung satu sama lain. Negosiasi dan mediasi merupakan metode/teknik resolusi konflik dengan cara bertemu langsung antara pihak-pihak

yang berkonflik, namun mediasi pembicaraannya menggunakan perantara (Ewart *et al.*, 2024; Nordal *et al.*, 2025; Lewin *et al.*, 2025). Pertemuan pihak-pihak yang berkonflik tersebut dilakukan pada kegiatan pelatihan dan FGD resolusi konflik pada Gambar 2.

Tabel 2. Formula resolusi konflik pemanfaatan potensi maritim

| Jenis konflik | Resolusi Konflik | Komitmen Penyelesaian Konflik | Peluang Integrasi Kegiatan |
|---|------------------|--|--|
| Perselisihan tentang sampah di perairan pantai | Konsiliasi | Tidak membuang sampah sembarangan | Pembangunan tempat pengolahan sampah bersama |
| Penguasaan wilayah perairan untuk <i>spot</i> wisata di areal <i>fishing ground</i> | Negosiasi | Tidak memperluas <i>spot</i> wisata ke <i>fishing ground</i> , tidak ada intimidasi terhadap wisatawan | Pemanfaatan kapal nelayan ke <i>spot</i> wisata |
| Keasaman perairan tinggi di lokasi yang berdekatan dengan tempat wisata dan pasar | Mediasi | Dilakukan penanganan limbah cair sebelum dibuang ke lingkungan, pengontrolan kualitas lingkungan secara berkala mediasi konflik oleh LPI | Pembuatan IPAL bersama |
| Alat tangkap sering hilang/rusak di jalur pelayaran wisata | Negosiasi | Pelayaran menghindari areal penangkapan ikan, pemasangan alat tangkap akan diberi tanda | Pemanduan pelayaran wisata |
| Kerusakan terumbu karang/habitat ikan di perairan dangkal | Mediasi | Pelarangan mengambil karang pada saat <i>diving</i> dan <i>snorkeling</i> , Pelarangan operasi alat tangkap destruktif di kawasan terumbu karang | Dukungan bersama dalam program konservasi terumbu karang |
| Hasil tangkapan ikan menurun di perairan pantai | Konsiliasi | Pengaturan zona untuk rekreasi pantai, tidak ada intimidasi terhadap wisatawan, perlindungan ruaya ikan | Pemanduan wisata pantai, pendaratan ikan menjadi obyek wisata pantai |
| Kecemburuan terhadap sistem rekrutmen tenaga kerja wisata | Negosiasi | Rekrutmen tenaga kerja wisata diprioritaskan kepada penduduk lokal, penyiapan tenaga kerja terampil di masyarakat | Kerja sama penyediaan pekerjaan dan tenaga kerja terampil |
| Perselisihan terkait abrasi di tempat pendaratan ikan tradisional | Mediasi | Pemasangan turap secara berimbang di areal pelabuhan, tempat wisata, dan tempat pendaratan ikan | Kerja sama penangkalan abrasi dan pengembangan usaha bersama pada tanah timbun |



Gambar 2. Pelatihan dan FGD resolusi konflik dengan model ICOFISH-MT

Pilihan teknik negosiasi dan mediasi memberi indikasi bahwa pihak-pihak yang berkonflik terutama nelayan dan pelaku wisata, tidak menyimpan dendam satu sama lain. Diantara mereka tidak ada yang memilih teknik litigasi (proses hukum), sehingga tidak ada konflik yang penyelesaiannya berujung di pengadilan (Gomez *et al.*, 2021). Pihak-pihak yang berkonflik juga menyatakan menyatakan komitmennya (Tabel 2) untuk mengambil tindakan nyata guna mereda konflik, bahkan membangun sinergi satu sama lain. Misalnya terkait perselisihan tentang sampah di perairan pantai, mereka berkomitmen untuk tidak membuang sampah sembarangan.

Untuk menjaga komitmen tersebut, mereka berintegrasi/bersinergi untuk membangun tempat pengolahan sampah bersama. Selanjutnya untuk perselisihan terkait abrasi di tempat pendaratan ikan tradisional, dilakukan pemasangan turap secara berimbang di areal pelabuhan, tempat wisata, dan tempat pendaratan ikan. Sinergi/integrasi yang disepakati adalah kerja sama penangkalan abrasi dan pengembangan usaha bersama pada tanah timbun. Tanah timbun terjadi karena sedimentasi dan timbunan polutan pada sisi pantai yang tidak terkena abrasi (Halim *et al.*, 2022, Mutaqin *et al.*, 2024). Komitmen dan peluang integrasi tersebut disusun dan disepakati pada kegiatan pelatihan dan FGD (Gambar 2). Khusus untuk perselisihan terkait abrasi dan keasaman perairan, komitmen dan peluang integrasi disusun setelah memeriksa kondisi lapangnya.

Lembaga Pengelola Konflik dan Skema Integrasi Pemanfaatan Potensi Maritim

Untuk mengoptimalkan penyelesaian konflik, sekaligus merealisasikan peluang integrasi pada Tabel 2, maka dibangun lembaga pengelola konflik dan disusun skema kerja samanya. Pada kegiatan pelatihan dan FGD yang dilakukan, lembaga tersebut telah dibentuk dengan kepengurusan lima orang yang terdiri dari: ketua (1 orang), wakil ketua (1 orang), sekretaris (1 orang), dan seksi kegiatan (2 orang). Lembaga tersebut diberi nama Lembaga Pengelola ICOFISH-MT (LPI), dengan tugas dan fungsi:

- a. Menjadi penengah jika terjadi konflik pemanfaatan potensi maritim antara nelayan, pengelola wisata, dan masyarakat di Kawasan PP Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, NTB.
- b. Membina, mengawasi, dan/atau mengarahkan kegiatan integrasi perikanan, wisata bahari, jasa kelautan, dan lainnya yang dilakukan di Kawasan PP Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, NTB.
- c. Menjadi mitra dari program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh IPB University melalui kegiatan Dosen Pulang Kampung, Dosen Mengabdi, dan lainnya.

Mengacu kepada tugas tersebut, LPI membantu dalam pembinaan dan pengawasan kegiatan integrasi/skema kerja sama pemanfaatan potensi maritim (Tabel 3). Jika ada konflik baru, maka LPI juga membantu dalam penyelesaiannya.

Skema kerja sama Tabel 3 disusun dalam rangka memanfaatkan peluang integrasi kegiatan perikanan, wisata bahari, jasa kelautan, dan lainnya yang dinyatakan pada Tabel 2. Disamping menyelesaikan konflik, pengembangan skema kerja sama membantu nelayan, pelaku wisata,

masyarakat, dan pengelola pelabuhan untuk menguatkan satu sama lain dalam pemanfaatan potensi maritim di Kabupaten Lombok Timur, NTB. Hal ini sesuai dengan arahan model ICOFISH-HT untuk membangun integrasi/kolaborasi sebagai nilai lebih dari penyelesaian konflik. Menurut Mustaruddin *et al.* (2020) dan Lewin *et al.* (2025), penyelesaian konflik dengan memberdayakan potensi sinergi para pihak yang berkonflik dapat menjaga keberlanjutan usaha dan menjamin kelestarian potensi maritim dan lingkungannya.

Tabel 3. Skema kerja sama dan bentuk peran dalam integrasi pemanfaatan potensi maritim

| Peluang Integrasi Kegiatan | Skema Kerja sama | Pembagian Peran | Mitigasi Konflik | | | Urgensi |
|--|----------------------------------|--|------------------|-----|-----|----------------|
| | | | Ling | Eko | Sos | |
| Pembangunan tempat pengolahan sampah bersama | Kerja sama non-profit | Pelaku wisata dan pengusaha perikanan menyediakan anggaran, nelayan dan masyarakat membangun tempat sampah dan memeliharanya | +++ | | ++ | Mendesak |
| Pemanfaatan kapal nelayan ke <i>spot</i> wisata | Kerja sama profit | Nelayan menyediakan kapal, pelaku wisata mengkoordinir wisatawan, pelabuhan mengatur jalur pelayaran | | +++ | + | Mendesak |
| Pembuatan IPAL bersama | Kerja sama non-profit | Pelaku wisata dan pengelola pasar menyediakan anggaran, nelayan membantu pembuatan dan pengoperasian | +++ | | ++ | Agak mendesak |
| Pemanduan pelayaran wisata | Kerja sama profit | Pelaku wisata menyediakan sarana pelayaran, nelayan membantu pemanduan wisata, pelabuhan mengatur jalur | | +++ | + | Tidak mendesak |
| Dukungan bersama dalam program konservasi terumbu karang | Kerja sama non-profit | Pelaku wisata & pengusaha perikanan menyediakan benih, nelayan membantu penanaman | +++ | | + | Agak mendesak |
| Pemanduan wisata pantai, pendaratan ikan menjadi obyek wisata pantai | Kerja sama profit | Pelaku wisata menyediakan fasilitas wisata, pelabuhan mengatur alur pendaratan ikan, keluarga nelayan menjadi guide wisata pantai | | +++ | ++ | Agak mendesak |
| Kerja sama penyediaan pekerjaan dan tenaga kerja terampil | Kerja sama profit | Pelaku wisata menyediakan lapangan kerja wisata, nelayan dan masyarakat menyiapkan tenaga sesuai spesifikasi wisata | | ++ | +++ | Agak mendesak |
| Kerja sama penangkalan abrasi dan pengembangan usaha bersama pada tanah timbun | Kerja sama profit dan non-profit | Pelabuhan menyiapkan turap di kedua sisi pantainya, nelayan membantu dalam pengerjaan turap, pelaku wisata mendukung realisasi usaha bersama, keluarga nelayan menjadi pekerja usaha | +++ | ++ | ++ | Mendesak |

Skema kerja sama dan pembagian peran yang tepat para pihak (Tabel 3) memberi dampak mitigasi yang besar terhadap konflik lingkungan, ekonomi, dan sosial di Kabupaten Lombok Timur. Mitigasi seperti ini, tidak hanya dapat menetralkan isu utama konflik, tetapi juga isu turunannya di kawasan pelabuhan perikanan. Hal ini karena skema kerja sama Tabel 3, dibangun dengan melihat cerah integrasi pada kegiatan yang menjadi sumber konflik, dan para pihak yang berkonflik juga diberi peran yang tepat (Msomphora, 2016; Yalcin *et al.*, 2023; Das *et al.*, 2025). Dari delapan peluang integrasi yang ada, pengelolaan bersama sampah perikanan dan wisata bahari, pemanfaatan kapal nelayan ke *spot* wisata, serta kerja sama penangkalan abrasi dan pengembangan usaha bersama pada tanah timbun dianggap lebih mendesak.

Hal ini karena dampak sampah dan abrasi terasa sangat nyata di Kabupaten Lombok Timur (Ayunda *et al.*, 2014; Mustaruddin *et al.*, 2022). Informasi dalam FGD menyatakan bahwa sampah tersebut telah menyebar di seluruh perairan Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah terbanyak ada di kawasan pelabuhan perikanan dan tempat wisata. Abrasi juga telah merubah garis pantai dan mengerus areal pendaratan ikan nelayan (DKP Kabupaten Lombok Timur, 2024; Mutaqin *et al.*, 2024). Sedangkan untuk pemanfaatan kapal nelayan ke *spot* wisata, dapat secara signifikan mempekerjakan banyak nelayan, sekaligus meminimalisir potensi konflik perikanan dan wisata yang terjadi di perairan. Hal ini juga menghindari intimidasi wisatawan dan aksi saling merusak sarana penangkapan ikan dan wisata di perairan (Byrnes *et al.*, 2016; Ewart *et al.*, 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Konflik pemanfaatan potensi maritim yang terjadi saat ini di Kawasan PP Labuhan Haji ada 8 (delapan), terbagi atas 4 konflik lingkungan, 3 konflik ekonomi, dan 1 konflik sosial. Dari 8 konflik tersebut, 2 konflik berstatus ada penyelesaian skala terbatas, 6 konflik berstatus belum ada penyelesaian. Implementasi model ICOFISH-MT dalam penyelesaian konflik menunjukkan teknik resolusi konflik terpilih dominan adalah negosiasi dan mediasi (75 %), dan tidak ada pilihan litigasi (prose hukum).

Lembaga pengelola konflik yang terbentuk diberi nama Lembaga Pengelola ICOFISH-MT (LPI) dengan kepengurusan lima orang yang terdiri dari: ketua (1 orang), wakil ketua (1 orang), sekretaris (1 orang), dan seksi kegiatan (2 orang). Skema kerja sama untuk memanfaatkan peluang integrasi/sinergi kegiatan dari para pihak yang berkonflik terdiri atas 4 kerja sama profit, 3 kerja sama non-profit, dan 1 kerja sama profit dan non-profit. Peran para pihak dalam penyelesaian konflik dan integrasi pemanfaatan potensi maritim disesuaikan dengan bidang pekerjaannya dan bersifat saling menguntungkan.

Penyelesaian konflik pemanfaatan potensi maritim perlu memberi peran lebih kepada nelayan, pelaku wisata, pengelola pelabuhan, dan masyarakat pesisir yang berkonflik. Hal ini penting untuk kelanggengan kesepakatan penyelesaian. Lembaga pengelola konflik dibentuk perlu diberdayakan oleh PEMDA Kabupaten Lombok Timur, karena mereka terbentuk di masyarakat dan selalu ada di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim IPB University yang telah mensponsori studi ini melalui Program Dosen Pulang Kampung Tahun 2025.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayunda N, Hidayat A, Anna Z. 2014. Efektivitas Kelembagaan Awig-Awig dalam Mengelola Sumber Daya Perikanan Pantai di Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ekonomi Pertanian, Sumberdaya dan Lingkungan* 1(1): 12-27.
- Byrnes T, Buckley R, Howes M, Arthur JM. 2016. Environmental Management of Boating Related Impacts by Commercial Fishing, Sailing and Diving Tour Boat Operators in Australia. *Journal of Cleaner Production* 111(2) : 383-398.
- Das, A, Chong VK, Masschelein S, Wang IZ, Woodliff DR. 2025. The Effects of Performance-Based Profit-Sharing Schemes and Client Pressure on Auditors' Pre-Negotiation Judgments. *Advances in Accounting*, 68: 100781.
- Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lombok Timur. 2024. Laporan Kinerja Kelautan dan Perikanan. DKP Kabupaten Lombok Timur. Selong. 65 hal.
- Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur. 2023. Potensi dan Destinasi Pariwisata Kabupaten Lombok Timur. Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur. Selong. 54 hlm.
- Ewart M, Scherrer P, Dimmock K. 2024. Managing Commercial Tourism for Conservation and Sustainable Use: Policy Instrument Interactions in Cape Byron Marine Park, Australia. *Marine Policy* 16: 106233.
- Firdaus M, Shafitri N, Witomo C M 2020. Pemberdayaan Perikanan di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Buletin Ilmiah Marina* 6(2): 85-98.
- Gomez S, Carreno A, Lloret J. 2021. Cultural Heritage and Environmental Ethical Values in Governance Models: Conflicts Between Recreational Fisheries and Other Maritime Activities in Mediterranean Marine Protected Areas. *Marine Policy* 129: 104529.
- Halim MAR, Soeprobowati TR, Hadiyanto H. 2022. Identification of Potential Water Pollution in Coastal Areas from Anthropogenic Activities in Karimunjawa National Park. *AACL Bioflux* 15(6): 2969-2981.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2024. Data Sebaran Nelayan di Indonesia. <https://portaldata.kkp.go.id/portals/data-statistik/nelayan/summary> (diakses tanggal 20 Juli 2025).
- Lewin WC, Pierce ME, Arlinghaus R, Weltersbach MS, Strehlow HV. 2025. Stakeholder Workshops on Western Baltic Cod Fisheries–Conflict and Consensus in the Face of a Highly Dynamic Ecosystem. *Biological Conservation* 302: 110983.
- Msomphora MR. 2016. Conflict Resolution and the Delegation of Authority in Fisheries Management: The Case of Outer Hebrides Inshore Fisheries Group in Scotland. *Marine Policy* 73: 263-275.
- Mustaruddin, Febrianto A, Baskoro MS, Firdaus LA. 2020. Technical and Environmental Considerations in the Development of Capture Fisheries in Tukak Sadai Port Area, South Bangka Regency, Indonesia. *AACL Bioflux* 13(4):1877-85.
- Mustaruddin, Baskoro MS, Santoso D, Karnan. 2022. Efektivitas Atraktor dan Strategi Pengkayaan Stok Cumi-Cumi di Tanjung Luar, Kabupaten Lombok Timur, NTB. *Albacore Journal*, 6(3): 281-291.
- Mustaruddin, Purwangka F, Puspito G. 2024. Model Integrasi Pengelolaan Perikanan Pantai dan Wisata Bahari untuk Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Maritim di Kabupaten Lombok Timur, NTB. *BIMA Kemendikbudristek*. Jakarta. 34 hal.

- Mutaqin BW, Isnain MN, Ningsih RK, Darmawan H, Suratman. 2024. Grain Size and Sedimentation Process in the Anak Krakatau Coastal Area of Indonesia. *Results in Earth Sciences* 2:100018.
- Nordal R, Beaudreau AH, Aceves-Bueno E, Olson, A. 2025. Assessing the Social-Ecological Dimensions of Dungeness Crab Fishery Closures in Southeast Alaska from Analysis of Public Records. *Fisheries Research* 288:107429.
- Qolby I, Hailuddin. 2022. Strategi Pengembangan Daerah Wisata (Studi kasus Desa Wisata Kembang Kuning Lombok Timur NTB). *Elastisitas* 4(1):107-120.
- Trathan P, Friedlaender A, Johnson C, Reisinger R. 2025. The Fishery for Antarctic krill – Conflicts Between Industrial Production, Protection of Biodiversity, and Legal Governance. *Marine Policy* 180: 106787.
- Yalcin GC, Kara K., Toygar A, Simic V, Pamucar D, Köleoğlu N. 2023. An Intuitionistic Fuzzy-Based Model for Performance Evaluation of Ecoports. *Engineering Applications of Artificial Intelligence* 126(D): 107192.